

PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM

Wakidul Kohar

Dosen Fakultas Dakwah IAIN IB Padang

Abstrak

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat muslim menjadi tema yang tidak pernah habisnya. Hal itu lebih disebabkan karena masyarakat Islam ideal yang dicita-citakan itu belum terbentuk secara sempurna pasca Negara madinah bentukan Nabi SAW. Dewasa ini pembinaan masyarakat muslim lebih diarahkan kepada pengembangan media-media yang akan mempercepat pemberdayaan masyarakat. Media komunitas merupakan sebuah konsep baru sebagai basis pengembangan masyarakat muslim ke depannya.

Kata Kunci: Media Komunitas, Pengembangan Masyarakat Islam

A. Pendahuluan

Media komunitas merupakan terobosan baru untuk pemberdayaan masyarakat muslim. Media komunitas merupakan wadah yang akan menghimpun informasi yang berguna untuk memahami masyarakat. Pilar utama yang memainkan peran penting dalam pengembangan media komunitas itu adalah sumber daya atau kualitas para jurnalis, dan pengelola media masa Islam. Karena

realitas menunjukkan sebagian menekuni profesi jurnalis adalah sebagai pelarian. Artinya setelah gagal dalam semua lapangan kerja, pada akhirnya jurnalis sebagai pilihan terakhir. Wawasan para wartawan atau jurnalis sangat sempit. Hal ini disebabkan karena pola pikir yang sektarian, pemikiran yang sangat primordialistik, karena dididik dalam keorganisasian yang mengembangkan pemikiran primor-

diallistik. Sehingga menjadi wartawan pun masih terbawa kepompong primor-diallistiknya. Media komunitas Islam bila ingin punyai daya saing dengan media lainnya, diperlukan komunikasi sosial. Dalam arti media masa yang terbit harus dibantu penyebarannya dan penafsirannya oleh lembaga-lembaga keislaman. Juga diperlukan sebuah lembaga *media wact Islam*

B. Tata Dunia Baru Informasi Islam Menuju Pengembangan Komunitas

Di zaman pesatnya kemajuan teknologi seperti saat sekarang ini, sarana informasi sudah tersedia dalam segala bentuk dan variasinya. Informasi yang diterima masyarakat bisa melalui radio, media cetak dan televisi. Oleh karena itu, informasi sekecil apa pun tidak bisa disembunyikan, mulai berita kelaparan, bantuan kredit mikro sampai pemilu di Amerika.

Sementara berbagai persoalan juga terkait dengan pengembangan komunitas Islam. Islam mempunyai keunikan dibanding dengan agama maupun atau ideologi yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang menyusuri ruhiyah (spiritual), akan tetapi juga meliputi politik (*siyāsah*), atau dengan istilah lain Islam adalah aqidah spiritual dan politik. Tetapi, mengapa Islam sering disebut hanya

sebagai agama dan bukannya ideologi. Ini kerana akibat dari analogi generalisasi, yaitu usaha untuk memberikan pandangan yang sama-rata, bahwa Islam sama dengan agama yang lain. Kerena, tidak ada agama lain yang mempunyai konsep politik, yang mengatur persoalan kehidupan, maka Islam juga sama. Tentu penafsiran ini sangat berat sebelah dan berbau pelecehan serta dakwaan yang tidak disertai pemahaman yang mendalam tentang Islam. Sebab, kebanyakan mereka yang mengkaji Islam tidak memahami realita kehidupan dan mereka yang memahami realita kehidupan tidak berasaskan pada Islam. Hasilnya tidak pernah memberikan kesimpulan yang lengkap. Masing-masing berjalan dalam ruangan yang salah dan kurang. Namun, anehnya mereka sering mendakwa orang-orang Islam yang berpandangan menyeluruh tentang Islam, sebagai ajaran spiritual dan politik, dikatakan sebagai tindakan apologis (membela/mempertahankan diri).

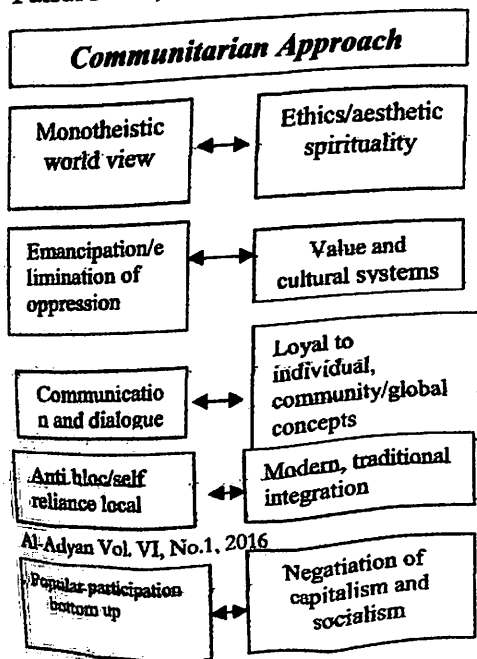
Suatu kesalahan untuk menyatakan bahwa Islam itu hanya sebagai agama semata dan begitu juga untuk menyatakan Rasulullah SAW di utus hanya membawa misi agama dalam arti kata hanya spiritual semata-mata. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana Islam dalam pandangan para orientalis yang mengakui bahwa

Islam adalah agama dakwah (*missionary religion*). (M. Yunan Yusuf, 2005: 3) Bahkan Schacht, mengatakan Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. (Schacht, 2006: 333)

Oleh karena itu, berdasarkan kajian antar unsur dakwah yaitu unsur *mad'u* dan tujuan dakwah dan untuk melihat lebih jauh tentang keuniversalan konsep Islam tentang agama dan ideologi, pada tulisan ini mencoba mengungkapkan bagaimana membangun dan mengembangkan masyarakat dengan pendekatan komunitas. Maka pendekatan komunitarian-lah yang paling tepat untuk mengkaji konsep-konsep yang pernah dikemukakan oleh Hamid Mowlana dan Tahrenian (Andi Faisal Bakti, 2004: 337-338)

Aqidah adalah pondasi berdirinya masyarakat Islam. Pondasi tauhid sebagai landasan untuk berjuang, memantapkan akal dan hati manusia, mendidik generasi penerus umat Islam agar tetap teguh berdiri di atasnya, membelanya dari hujatan para penghujat dan dari kesalahfahaman kaum yang menyesatkan. Merealisasikan keutamaan tauhid ini dan pengaruhnya dalam kehidupan individu dan masyarakat, lewat berbagai media instrumental pembentuk opini yang efektif dalam perjalanan hidup masyarakat, terdiri dari masjid, sekolah, surat kabar, radio, televisi, internet, hp, teater, sinema (film) dan sastra dengan segala seninya, yang terdiri dari syair (puisi), cerita dan lain sebagainya. Berdirinya komunitas Islam berdasarkan aqidah Islam merupakan konsekuensi yang komit terhadap *monotheistic word view* (tauhid). (Hamid Mowlana, 1996: 90, 113)

Komunitas Islam bukanlah masyarakat yang materialistis, sekular dan bukan penganut animisme-dinamisme. Ia bukanlah masyarakat Yahudi dan Nasrani, bukan masyarakat liberal kapitalis, dan bukan pula masyarakat sosialis



marxis. Melainkan ia adalah sebuah masyarakat religius yang mengagamakan aqidah tauhid (*monotheistic word view*), yaitu aqidah Islam. Aqidah Islam tidak rela berada dalam posisi marjinal dalam kehidupan masyarakat dan terasing oleh aqidah lain yang merubah pandangan manusia terhadap Allah, manusia, alam dan kehidupan.

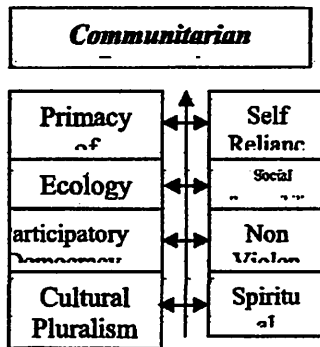
Selain tauhid, akhlak dan spiritualitas adalah satu bagian yang original dari eksistensi masyarakat Islam. Ia adalah masyarakat yang penuh keadilan, kebaikan santun dan kasih sayang, kejujuran dan amanat, kesabaran dan kesetiaan.

Kesetiaan merupakan kesetiaan terhadap janji Allah, hubungan tersebut adalah manivestasi dari apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, kesabaran tersebut sesungguhnya hanyalah untuk mencari ridha Allah dan infak tersebut adalah dari apa yang telah Allah rizkikan, semua itu adalah akhlak rabbaniyah yang berhubungan dengan Allah, oleh karena itu digabungkan dengan masalah mendirikan shalat. Hal ini dikarenakan semuanya merupakan satu bentuk manivestasi dari ibadah yang mana kaum muslimin melakukan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah atau dalam bahasa Hamid Mowlana adalah *ethics or aesthetic spirituality*. (Hamid Mowlana, 1996: 90, 113)

Sesungguhnya tradisi, adab kesopanan dan adat istiadat ini dibangun oleh Islam dalam masyarakatnya untuk melayani kepentingan aqidah dan spiritualitasnya, pemahaman dan cita rasanya, akhlak dan nilai-nilai kulturalnya. Sebuah komunitas akan tegak jika tata sosial dan tradisi sebagai wujud dari keyakinan mereka terhadap agama dan syari'atnya, Sehingga menjadikannya berpola dengan nilai-nilai dan kulturalnya sendiri (*value and cultural systems*). (Hamid Mowlana, 1996: 90, 113)

Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan dalam *communitarian approach* adalah *emancipation or elimination of oppression* (kebebasan), yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu kebebasan juga bisa menjadikan manusia seperti yang diharapkan Allah sebagai pemimpin di alam ini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah.

Communitarian approach menurut Majid Tehranian (Majid Tehranian, 1999: 95-96) adalah seperti bagan berikut:



Salah satu prinsip pengembangan masyarakat Islam adalah kebebasan beragama merupakan suatu contoh kebebasan dalam berakidah (keyakinan) dan kebebasan melakukan ibadah (*spiritual freedom*). (Majid Tehranian, 1999 :95-96). Maka, Islam sama sekali tidak dapat menerima perlakuan seseorang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang dianut dan dipeluknya, atau dipaksa untuk memeluk suatu agama yang tidak ia sukai. (QS. Yunus: 99 dan QS. Al-Baqara/2: 256). Bahkan kebebasan terwujud hanya jika disertai dengan ketundukan tertentu, yaitu ketundukan kepada yang secara intrinsik benar, yakni, benar pada dirinya sendiri, tidak pada faktor luar secara tidak sejati.

Sesuatu yang terdengar seperti paradoksal ini diakui oleh Huston Smith, justru dalam pengamatannya atas fenomena Islam. Islam yang berarti sikap pasrah atau tunduk (kepada Tuhan) justru menjadi pangkal kebebasan kaum Muslim

dan merupakan sumber energi yang hebat. (Huston Smit, 1982:141).

Salah satu cara bagian dari kebebasan ialah mengajak berdialog untuk menghilangkan kefanatikan, mengurangi keterbatasan dan cara pandang yang sempit. Antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau bahkan antar agama juga perlu didialogkan hingga menemukan titik temu dan titik rawannya. Oleh karena itu dalam ajaran Islam telah dijunjung tinggi kegiatan berdialog, QS. al-Nahl/16 ayat 125 karena hal ini merupakan bentuk komunikasi yang baik (*communication and dialogue*).

Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat menerima seruan informasi atau nilai-nilai kebenaran dari Islam secara begitu saja ia mendengar seruan itu. Ada tipologi manusia yang merasa perlu untuk mempertanyakan dahulu kebenaran yang disampaikan kepadanya. Pada manusia semacam inilah *communication and dialogue* akan memainkan peranannya sehingga masyarakat akan menerimanya dengan perasaan mantap dan puas setiap ada ketersinggungan antara anggota komunitas.

Tak dinafikan bahwa bentuk komunikasi yang baik di zaman modern ini merupakan keharusan yang mesti dibudayakan, baik komunikasi dalam keluarga, dalam

bisnis, bahkan dalam politik. Misalnya, suatu kebiasaan di kalangan kaum Muslim dalam pembicaraan mengenai cita-cita politik ialah menyebutkan masa-masa *al-khulafâ al-râsyidûn* (para Khalifah yang bijaksana) sebagai masa-masa teladan. Meskipun cara penglihatan yang dilakukan terhadap masa-masa itu banyak yang merupakan hasil rekonstruksi yang tidak sedikit mengalami idealisasi, namun menurut Robert N. Bellah, tetap mengandung berbagai alasan yang cukup substantif. Bahkan, masyarakat Islam klasik itu modern secara moncolok (*remarkably modern*) begitu rupa sehingga tidak bertahan lama. (Robert N. Bellah, 1970: 150-151)

Ada beberapa hal yang membuat Bellah menilai bahwa masyarakat Islam paling dini itu modern. Di antaranya ialah tingkat partisipasi politik yang terbuka dan tinggi dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Juga keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat itu untuk diuji kemampuan mereka berdasarkan ukuran-ukuran yang universal (berlaku bagi semua orang), yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (apa pun bentuk teknisnya pada masa

tersebut). (Robert N. Bellah, 1970: 150-151)

Pangkal kesadaran yang amat asasi ini cukup umum, dan dicerminkan antara lain dalam diktum, "*Al-'itibâr fi al-Jâhiliyah bi al-ansâb, wa al-'itibâr fi al-Islâm bi al-'amâl*" (penghargaan di masa Jahiliyah berdasarkan keturunan [prestise], dan penghargaan di masa Islam berdasarkan hasil kerja [prestasi]). Dengan perkataan lain, dalam jargon ilmu sosial modern, sistem masyarakat Islam adalah universalistik dan terbuka, karena menggunakan tolak ukur prestasi untuk menilai seseorang, sedangkan masyarakat Jahiliyah atau yang sejenis itu adalah masyarakat askriptif dan tertutup, karena menggunakan tolak ukur seperti faktor keturunan untuk menilai seseorang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kriteria masyarakat komunitarian yang dikemukakan Majid Tehranian dengan istilah *participatory democracy*. (Majid Tehranian, 1999:95-96) Artinya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dalam komunitasnya (*popular participation bottom up*). (Hamid Mowlana, 1996: 90, 113)

Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Muslim yang disatukan oleh ikatan agama, melebihi identitas nasional, kesukuan dan etnis atau dikenal sebagai *ummah* (*negation of capitalism and socialism*). (Hamid

Mowlana, 1996: 90, 113). Kepercayaan seperti ini didasarkan pada al-Qur'an, (QS. Al-Baqarah/2: 143) yang menyatakan bahwa Allah menciptakan umat Muslim untuk menjadi saksi dari bimbingan Allah pada bangsa-bangsa tersebut. (Norma Arbi'ah Juli Setiawan 2005: 15)

Islam diwayuhkan pada waktu ~~dan tempat, dimana kesetiaan suku dianggap identifikasi paling penting seseorang.~~ Status individu didasarkan pada keanggotaannya pada suku tertentu. Islam menyatakan kesamaan mutlak bagi semua yang beriman. Identitas utama dari Muslim adalah sebagai seorang Muslim bukan sebagai anggota suku, etnis atau jenis kelamin tertentu. Pendapat dari egaliterianisme radikal ini menghancurkan pentingnya identitas kesukuan dan mendorong kepercayaan bahwa *loyal to individual, community/global concepts* atau dengan kata lain setiap Muslim harus selalu mempertahankan dan melindungi Muslim lainnya. Artinya umat Islam harus memiliki kemandirian yang kuat (*anti bloc/self reliance local resources*). (Hamid Mowlana, 1996: 90, 113)

Maka agama yang mengajarkan *al-Islam* ini adalah agama yang mengacu kepada sikap keruhanian seorang individu, jauh di lubuk hatinya, ke arah kemauan dan niat yang baik, tulus dan sejati, sebagaimana hal itu telah menjadi

ajaran para Nabi, yang dekat sebelum Nabi Muhammad ialah Nabi Isa al-Masih, Musa, dan Ibrahim. Tetapi ketika *al-Islam* yang pada intinya bersifat pribadi itu memancar keluar dalam bentuk tindakan-tindakan, dan ketika tindakan-tindakan dari banyak pribadi Muslim itu terkait, saling menopang, dan kemudian menyatu, maka Islam pun melandasi terbentuknya suatu kolektiva spiritual (*ummah*, umat), dengan ciri-ciri yang khas sebagai pancaran cita-citanya yang khas. Maka sampai batas inilah *al-Islam* mendorong lahirnya pola-pola ikatan kemasyarakatan, dan itu intinya ialah hukum. Inilah Islam historis, yaitu *al-Islam* yang telah menwujud-nyata sebagai pengalaman bersama yang bisa diidentifikasi, suatu bentuk kesatuan kemasyarakatan manusia beriman yang disebut umat, dengan kesadaran *berhukum dan berperaturan bersama* sebagai intinya. (Nurcholish Madjid, 1992: 382-383)

Ummah sering dipakai untuk menunjukkan pada kesatuan esensial dari semua Muslim, meskipun mereka berada pada geografi dan kultur yang beragam. Tradisi Nabi (hadits) berbicara tentang *ummah* sebagai komunitas spiritual, bukan teritorial dari Muslim yang dibedakan dan disatukan oleh kepercayaan bersama dari anggota-anggotanya. Konsep ini menjadi penting secara khusus pada abad ke-

19 era kolonialisme Eropa dan kebangkitan nasionalisme. Gerakan pertahanan Islam diminta memertahankan *ummah* terhadap serangan Eropa di seluruh dunia Islam. Nasionalis, meskipun mencoba menyatukan negara mereka atas dasar kesetiaan nasional, tidak menentang otoritas konsep *ummah* dan kenyataan menggunakannya sebagai dasar untuk meminta kesatuan politik. Meskipun nasionalis sejak 1960-an telah mendorong pemisahan identitas agama dan nasional, namun islamis terus mendukung pendapat keanggotaan dalam *ummah* sebagai identitas utama bagi semua Muslim, bukannya identitas etnis, linguistik atau geografis. Muslim saat ini masih mempercayai *ummah* (*negation of capitalism and socialism*) sebagai identitas sosial, meskipun sekularisasi kehidupan publik dan penekanannya saat ini pada identitas politik nasional.

Untuk mengembangkan masyarakat berbasis komunitas tertentu terutama di berbagai wilayah komunitas Islam di Nusantara, maka sangat cocok bila menggunakan pendekatan *communitarian approach* dengan mengembanga media untuk pengembangan pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan atau sejenisnya. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis dan teknis diantaranya dengan prinsip

pengembangan 1) *monotheistic world view*, (masyarakat religius) 2) *ethics/aesthetic spirituality*, (masyarakat yang mempunyai jiwa spiritual dan etika) 3) *emancipation/elimination of oppression*, (komunitas yang menjunjung tinggi emansipasi) 4) *value and cultural systems*, (komunitas yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan terbuka dengan budaya lain (budaya inklusif), 5) *communication and dialogue*, (pengembangan model komunikasi yang dialogis antar rakyat dan pemimpin dalam pengertian pengembangan musyawarah) 6) *loyal to individual, community/global concepts*, adanya jiwa kesetiaan setiap individual dan mempunyai pemahaman yang benar terhadap masyarakat global) 7) *anti bloc/self reliance local resources*, (masyarakat yang tidak menonjolkan kelompok dalam arti menghilangkan etnosetrisme dan etnokomunal dalam arti menghilangkan primordialisme) 8) *modern, traditional integration*, (masyarakat yang mampu mengintegrasikan antara modernisasi dan nilai-naiai tradisional) 9) *popular participation bottom up*, (menampung aspirasi dan membangun daerah berdasarkan keinginan masyarakat bawah).

C. Strategi dan Kebijakan

Penyajian Informasi Islam Melalui Media Komunitas.

Dari berbagai persoalan di atas, sebuah keharusan bagi dunia Islam untuk menyusun strategi dan kebijakan informasi dan komunikasi atau dalam istilah keilmuan komunikasi disebut dengan *global communication /information policy and strategy*. Penyusunan strategi ini dilakukan oleh negara-negara berkembang atau negara ketiga ketika harus berhadapan dengan ledakan informasi. Kebijakan penyajian informasi Islam, perlu dilakukan dengan cara pemberdayaan media untuk pengembangan komunitas.

Liberalisasi kebijakan media yang diluncurkan pada masa kejatuhan presiden Suharto, telah berakibat pada munculnya beragam media. Salah satu yang akhir-akhir ini cukup populer dibicarakan dan dikembangkan adalah media komunitas. Media ini ditumbuh kembangkan di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang berbentuk media cetak, radio, hingga televisi. Pengelolannya pun beragam, mulai aktivis NGO, komunitas tertentu, aparat biokrasi pemerintah, perusahaan hingga rekayasa bisnis media.

Sebagai contoh koran-koran lokal milik group Jawa Pos. Dalam sebuah wawancara televisi, misalnya salah satu pimpinan Jaringan Group Jawa Pos di Riau mengatakan, bahwa apa yang dikembangkan kelompoknya adalah media komunitas. Radio komersial di sejumlah daerah juga

mengklaim dirinya sebagai radio komunitas. Demikian juga dengan televisi-televisi yang menyatakan diri mereka sebagai media komunitas. Dalam perspektif Hinca I Panjaitan, hampir 70 % pemiliknya adalah pemerintah (daerah) dan sebagian sisanya milik perusahaan-perusahaan besar seperti TV Bontang.

Berdasar realitas itu, ternyata menunjukkan banyak *interpereteble* tentang media komunitas. Apakah koran-koran lokal milik group Jawa Pos benar-benar media komunitas? Apakah TV Pematang Siantar atau TV Bontang juga benar-benar media komunitas? Maka sesungguhnya media komunitas tak dapat dilepaskan dari isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi komunitas. Salah satu problem penting yang banyak dibicarakan adalah perlunya penguatan komunitas, setelah sekian lama komunitas kehilangan otonominya, akibat pendekatan pembangunan yang *top down*. Paradigma *developmentalis*, yang menjadi landasan pembangunan di beberapa negara berkembang, ternyata telah melahirkan sejumlah problem yang kini dihadapi berbagai komunitas.

Problem tersebut antara lain, hancurnya identitas kultural dan perangkat kelembagaan yang dimiliki komunitas akibat penyeragaman dalam menacapai stabilitas politik dan ekonomi. Akibat lain, adalah hancurnya basis sumber daya

alam komunitas, akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan, serta melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi prolem-problem komunitas akibat domestifikasi negara.

Berbagai dampak akibat pendekatan yang *top down* atau sentralistik telah melahirkan berbagai kritik yang akhir-akhir ini, dijadikan landasan model pengembangan komunitas yang *bottom up* dan partisipatif. Hal yang sangat berkaitan dengan hal itu, adalah bagaimana media dapat berperan dalam proses pengembangan atau penguatan komunitas partisipatif.

Gagasan mengenai media komunitas, sesungguhnya berakar dan kritik-kritik terhadap pendekatan komunikasi model liberal yang cenderung mekanistik, vertikal dan linier yang banyak dipergunakan dalam model pembangunan. Asumsi dasar adalah bahwa akar persoalan bagi dunia ketiga dan penduduknya adalah minimnya pada aspek pendidikan dan informasi. Persoalan tersebut berakibat pada rendahnya inovatif dan produktivitas. Konsekuensinya akar permasalahan yang dihadapi dunia ketiga, akan selesai jika informasi ditingkatkan. Atas dasar asumsi tersebut, sistem media masa yang lantas dirancang pesannya secara baku dari atas ke bawah. Masyarakat penerima pesan

dianggap pasif dan ditempatkan sebagai objek.

Dalam prakteknya, khususnya di Indonesia, model komunikasi *top down* diterapkan dengan program koran masuk desa. Akibatnya menimbulkan beberapa efek, pertama, sifatnya yang *top down*, searah dan vertikal telah menciptakan jurang informasi antara elit dan masyarakat bawah. Elit mempunyai sejumlah kekayaan informasi, karena memiliki akses yang besar terhadap media, kerena mampu membeli dan membaca. Sementara masyarakat kecil, tetap miskin informasi dan media, disebabkan tidak mempunyai akses yang cukup, baik pada aspek ekonomi dan budaya. Kedua, struktur komunikasi yang feodalistik pada model tersebut cenderung manipulatif dan eksploitatif, karena adanya monopoli sumber-sumber media dan dominasi elit pemberi pesan terhadap masyarakat sebagai penerima pesan.

Berdasarkan realitas di atas, maka muncul beberapa gagasan model komunikasi yang partisipatif. Mengembangkan model komunikasi partisipatif pada dasarnya mengembangkan partisipasi *grassroots* dalam proses komunikasi. Dalam pendekatan model komunikasi partisipatif, komunitas diharapkan mampu merancang standar dan prioritas sendiri yang mungkin unik untuk masalah yang dihadapi.

Peran komunikasi partisipatif, memang lebih kompleks dan variasi. Peran komunikasi model ini, sangat tergantung pada standar dan tujuan normatif komunitas. Setidaknya, model ini dapat membantu pengembangan identitas kultural, bertindak sebagai wahana ekspresi diri masyarakat dalam komunitas, mendiagnosis masalah komunitas, serta memfasilitasi artikulasi berbagai problem komunitas.

Ada beberapa prinsip komunikasi partisipasi sebagai media komunitas diantaranya:

Pertama, akses. Secara singkat akses dapat diartikan sebagai kesempatan untuk menikmati sistem komunikasi atau informasi yang ada. Dalam prakteknya, terdapat dua tingkatan yaitu kesempatan untuk ikut memilih dan memperoleh umpan balik dari sistem informasi atau komunikasi yang ada.

Kedua, partisipasi. Partisipasi mengandung pengertian pelibatan anggota komunitas dalam proses pembuatan dan pengelolaan sistem komunikasi yang ada. Dalam penerapannya pelibatan ini dilaksanakan pada semua tingkatan, mulai dari tingkat perencanaan, tingkat pengambilan keputusan dan produksi.

Ketiga, persoalan swakelola dan swadaya. Ini adalah partisipasi yang paling maju. Dalam konteks ini,

anggota komunitas mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut komunikasi. Kekuasaan ini tidak hanya berkenaan dengan akses, untuk memperoleh informasi dan untuk berperan serta dalam mengelola sarana produksi, melainkan juga menyangkut pengelolaan komunitas terhadap sistem komunikasi dan pengembangan kebijakan komunikasi.

Selain penjelasan di atas, diuraikan tentang prinsip-prinsip model komunikasi partisipatif. Perhatikan tabel berikut:

Unsur	Komunikasi Top Down	Komunikasi Partisipatif
Tujuan	Perubahan perilaku, pengukuhan status quo dan rekayasa sosial	Pernyataan diri, pembentukan kesadaran dan tindakan pembebasan
Sifat	Terpusat, mengawasi secara ketat, membakukan norma dan nilai lama, mengarahkan perilaku seseorang guna menciptakan dukungan terhadap kepentingan pusat kekuasaan	Menyebarkan, mengembangkan lembaga dan memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat.
Isi pesan	Kebijakan pusat	Sesuai masalah

	kekuasaan, peringatan, peraturan dan ancaman	setempat, berdasarkan analisis sebab masalah, erat kaitanyadengan sejarah dan nilai-nilai setempat
Pemberi Pesan	Penguasa Pusat, lapisan atas terlepas	Pemberi pesan adalah juga penerima pesan
Penerima Pesan	Rakyat miskin tidak terpelajar, wong cilik.	Penerima pesan adalah juga pemberi pesan
Hubungan Pemberi dan penerima pesan	Simetrik, dominatif dan manipulatif	Simetrik, dan kesetaraan
Proses Penyebaran	Sembujur dari atas ke bawah (vertikal), searah (monolog)	Selintang ke samping (horizontal) atau dari bawah ke atas (bottom up), dua arah (dialogis)
Bentuk Media	Teknologi tinggi, mahal dan pada modal, jumlah besar-besaran	Sederhana, murah, tepat guna, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Peran Masyarakat	Kelompok Sasaran	Kelompok Partisipan
Peran NGO	Pelaku dan penentu	Fasilitator

Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan media komunitas, yang mampu menterjemahkan prinsip partisipatif pada model komunikasi partisipatif sehingga menjadi operasional untuk

mengembangkan dan penguatan komunitas. Dalam konteks ini ada beberapa isu penting yang perlu mendapat peran, karena pengaruhnya yang besar dalam mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi.

Visi dan misi media media komunitas. Antara lain model kepemilikan, model pembiayaan, model produksi, distribusi, serta pilihan bentuk media.

Model Kemilikan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, media yang menyatakan dirinya sebagai media komunitas memiliki status kepemilikan yang beragam. Ada yang dimiliki oleh institusi pemerintah (lokal) seperti Televisi Siantar, institusi bisnis seperti TV Bontang, Institusi NGO seperti Radio Suara Alam di Kendari atau Radio Kabari di Maumere, maupun individu-individu seperti radio-radio yang tergabung dalam jaringan Radio (JRP) Petani Jawa, Radio Komunitas Imam Bonjol di Sumatera Barat. Pola kepemilikan seperti itu, sebenarnya sangat rawan terjadinya bias kepentingan pemilik dalam proses operasional media komunitas. Sebab, institusi-institusi maupun individu-individu di atas memiliki kontrol penuh mulai dari proses perencanaan, tingkat produksi hingga distribusi. Sementara kontrol komunitas atas seluruh proses tersebut sangat terbatas, untuk tidak mengatakan sama sekali tidak ada.

Karena itu, agar prinsip dan oleh untuk komunitas dijalankan, komunitas harus memiliki kontrol penuh atas media komunitas. Salah satu caranya adalah bahwa media komunitas seharusnya dimiliki oleh komunitas atau model kepemilikan kolektif oleh komunitas.

1) Model Pembiayaan

Salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi orientasi media adalah sumber pembiayaan yang dipilih. Karena hal itu berpengaruh terhadap otonomi dan orientasi media yang bersangkutan. Sebagaimana contoh dari berbagai media yang telah terbit, yang pada mulanya berorientasi pada untuk penguatan komunitas menjadi media komersial. Contoh kasus adalah media Udik di Kupang. Pada awalnya media ini diterbitkan dalam bentuk *newsletter*, yang diperbanyak dengan cara difito copy. Media ini memuat hal-hal mikro yang terkait dengan persoalan komunitas. Pada tahun 200, tepatnya pada tahun ke dua terbitan ini, masuklah *Ford Foundation* sebagai *funding*. Pada akhirnya media Udik, mengalami perubahan, terutama pada format yang berwarna. Isinya Udik menampilkan berita yang lebih makro. Akhirnya setelah kontrak pendanaan dengan *Ford* habis. Untuk menjaga keberlanjutan eksistensi media ini, maka Udik memilih masuk pasar, dengan cara memasang

iklan komersial. Dengan demikian maka isi media harus menyesuaikan atau dengan kata lain dengan upaya kompromi dengan nilai-nilai pasar, yang tentu saja media Udik harus menerapkan standar nilai berita yang dikonstruksi pasar.

Dari kasus di atas sebenarnya, sistem pembiayaan sangat menentukan kontrol terhadap media. Dalam pengertian, bahwa kontrol komunitas terhadap media komunitas, akan semakin kuat akan semakin kuat apabila media komunitas dibiayai oleh komunitas.

2. Model Produksi/Konsumsi

Belajar dari pengalaman, bahwa beberapa media yang mengklaim bahwa mereka adalah media komunitas, namun dalam memproduksi media, mereka masih melakukan produksi secara elitis tanpa melibatkan partisipasi komunitas. Menurutnya proses produksi harus dilakukan oleh orang-orang yang dianggap tahu dan profesional, namun sisi lain, bahwa realitas komunitas yang sebenarnya tidak pernah diapungkan.

Untuk itu model produksi media komunitas harus didesentralisasi dan dideprofesionalisasi. Desentralisasi produksi dilakukan dengan menempatkan anggota komunitas sebagai aktor-aktor utama pembuat pesan media. Dengan demikian terjadi peleburan pada momen

produksi dan konsumsi. Dengan demikian terjadi mutual simbiosis, bahwa pemberi pesan adalah juga penerima pesan. Proses produksi media komunitas atau pesan media, tidak cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketrampilan, misalnya, jurnalis, tetapi terjadi *shifting* ke arah pandangan bahwa siapapun bisa berfungsi dan menjadi jurnalis di komunitasnya, atau dengan istilah jurnalis warga (*citizen journalism*), tentunya dengan batasan-batasan dan etika dalam aktivitasnya, sebagai jurnalis warga.

Lebih dari itu, bahwa profesi jurnalis bukan lagi monopoli orang-orang yang memiliki latar belakang jurnalis atau bekerja sebagai jurnalis profesional. Prinsipnya setiap anggota komunitas bisa menjadi jurnalis. Melalui partisipasi komunitas dalam proses produksi, terbuka peluang setiap anggota komunitas untuk mempengaruhi produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas komunikasi bagi kepentingan komunitas.

3. Pilihan bentuk Media

Dalam media komunitas, pilihan pada bentuk apa yang akan digunakan dalam proses komunikasi harus dilihat dalam konteks kebutuhan dan kemampuan komunitas. Pilihan tersebut harus didasarkan pada kemudahan anggota

komunitas untuk berpartisipasi dalam akses, proses produksi, pengambilan kebijakan komunikasi, maupun dalam pengelolaan media bersangkutan. Oleh karena itu pilihan penggunaan bentuk media dalam model media komunitas, yang partisipatif tidak cuma terpaku pada bentuk-bentuk media utama seperti radio, TV, surat kabar, yang seringkali pada modal dan melibatkan teknologi tinggi, tetapi juga berbagai bentuk media komunikasi lain, yang mungkin memiliki potensi kuat di sebuah komunitas seperti teater rakyat, kesenian rakyat, seperti ketropak untuk komunitas Jawa, wayang kulit untuk komunitas Jawa Tengah, randai untuk komunitas Minangkabau dan lain sebagainya.

Model media komunitas pada dasarnya, adalah model alternatif dan mainstream. Karena itu, tipologi media alternatif dan radikal media yang disusun Atton, sebagai dikutip Hanif Suranto, dapat membantu memperkuat penjabaran di atas.

Karakteristik Media Alternatif

Isi/Nilai Berita	Radikal secara sosial dan kultural
Bentuk	Terdapat keragaman Penyajian
Inovasi	Menggunakan mimeograf
Distribusi	Terdapat alternatif

	pendididmbasian
Relasi Sosial	Organisasi kolektif Pembaca dan penulis)
Proses Komunikasi	Horizantal

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa media komunitas adalah media yang menyuarakan problem nyata komunitas atau keumatan. Dalam kontek kekinian, bahwa problem masyarakat luas adalah terdapat psikokultural sehingga terjadi berbagai konflik antar komunitas. Dalam perspektif komunikasi setidaknya ada dua penjelasan atau teori penyebab konflik, yaitu hubungan masyarakat dan teori kesalahfahman antar-budaya. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi serta ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori tersebut adalah perhunya menambah pengetahuan pihak-pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi steoretip negatif yang mereka miliki menganai pihak lain, serta meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka media komunitas harus berperan dalam resolusi konflik

tersebut. Peran yang dapat dilakukan oleh media antara lain:

Pertama, meningkatkan pemahaman bersama antar pihak yang berkonflik dengan cara memfasilitasi terjadinya informasi yang cukup, kiranya dapat dijadikan dasar pijakan bersama antar pihal yang berkonflik dalam berkomunikasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menggali dan memaparkan secara jelas tidak hanya efek konflik secara psikis akan tetapi berkibat pada penghancuran eksistensi kehidupan umat manusia.

Kedua, mengembangkan nilai dan sikap toleransi atas keragaman dengan cara memfasilitasi penyediaan informasi mengenai nilai-nilai dan sikap toleransi atas keragaman dengan cara memfasilitasi penyedian informai menganai nilai-nilai dan sikap toleransi atas keragaman yang dipraktekkan dalam masyarakat atau komunitas. Hal itu, bisa dilakukan dengan cara menggali pengalaman-pengalaman anggota komunitas berkonflik yang menjunjung nilai-nilai toleransi baik dalam konteks sejarah maupun kebudayaan komunitas.

Ketiga, melakukan monitoring dengan cara memfasilitasi penyediaan informasi mengenai upaya pihak-pihak yang mempertahankan nilai-nilai perdamaian, serta pihak-pihak yang melanggar nilai perdamaian.

Keempat, melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang *voiceless* dengan cara memfasilitasi menyediakan akses kepada pihak-pihak tersebut sehingga dapat turut berpartisipasi dalam proses komunikasi.

Peran-peran tersebut dijalankan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip partisipasi yang melandasi keberadaan media komunitas, dengan tetap mengacu pada konteks kebutuhan komunitas.

D. Penutup

Untuk terwujudnya pengembangan media komunitas maka diperlukan sumber daya atau kualitas para jurnalis, dan pengelola media masa Islam. Karena realitas menunjukkan sebagian menekuni profesi Jurnalis adalah sebagai pelarian. Artinya setelah gagal dalam semua lapangan kerja, pada akhirnya

jurnalis sebagai pilihan terakhir.

Wawasan para wartawan atau jurnalis sangat sempit. Hal ini disebabkan karena pola pikir yang sektarian, pemikiran yang sangat primordialistik, karena didik dalam keorganisasian yang mengembangkan pemikiran primordialistik. Sehingga menjadi wartawan pun masih terbawa kepompong primordialistiknya. Media komunitas Islam bila ingin punyai daya saing dengan media lainnya, diperlukan komunikasi sosial. Dalam arti media masa yang terbit harus dibantu penyebarannya dan penafsirannya oleh lembaga-lembaga keislaman. Juga diperlukan sebuah lembaga *media wact Islam* untuk, mengkritisi, dan mengawasi setiap penerbitan media massa Islam demi penumbuhkembangan daya saing media komunitas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Rokaby, Al-Syeikh, (Dalam kuliah pada program Magister), *Fi Kuliayatu al-Da'wah wa Al-'Ilam*, Riyadh; Al-Mahadu al-'Aliyi Li Al-Da'watu Al-Islamiyatu Sabiqan, 1403 H.
- Al-Syanqithy, Sayyid Muhammad Sadaty *Mafahimu l'lamiyatu min al-qur'an al-Karim*, Riyadh: Dar "alimu al-Kitab, 1986
- Al-Waq,ie, no. 38 tahun IV- 1-31 Oktober 2003
- Amin Abdullah, *Arah Baru Kajian Islam Di Indonesia*, (Makalah Konfrensi Nasional) Yogyakarta: Hotel Syahid Raya, 2003
- Arifin, Anwar, *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*, Bandung : Armico, 1984
- Azra, Azyumardi, *Propesies STA tentang Kebudayaan*, Gatra; 10 Agustus, 2002
- Bachtiar Effendi, dalam kuliah Pasca Sarjana : *Kuliah Studi Pendekatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; UIN Syahid) tahun 2001.
- Davis, Gardon. B., *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999
- Dian Herdiansyah, *Revisi UU Pers Tak Menyoal Kehidupan Publik*, dalam rublik, Majalah
- Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998
- Farid Wadjdi, *Penyesatan Barat*, Al-Wa'ie, No. 30, III, 1-28 Februari, 20003
- Ghani, Zulkipli ABD *Islam Komunikasi dan Teknologi Maklumat*, Kuala Lumpur: UP & D Sdn Bhn, 2001
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insan Press, 1998
- Hamka, Rusjdi(ed), *Islam dan Era Informasi*, Jakarta: Panjimas, 1989.
- Hamzah, 'Abdu Al-Lathif, *Al-'Ilamu wa al-Du'ayatu*
Harian Haluan 2003
- Harun Nasution, dalam *Kuliah Pemikiran Islam, Pascasarjan IAIN Padang* , Padang: Kuliah Perdana, 1998.
- Jalaluddin Rahamat, *Dakwah dan Media Massa*, Pascasarjana UIN Jakarta 2001
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Rosda Karya, 1996,.
- Jalauddin Rahmat, *Islam Aktual*, Bandung : Mizan, 1996
- Jayaweere, Navillem, *Comunication Strategi for Developing Nation* dalam *Comunication and rural Change*, AMIC, Singapore. 1976.

SPRITUALITAS DAN PERUBAHAN SOSIAL

Indra

Dosen UIN Sumatera Utara

Abstrak

Islam dengan sifat ajarannya yang absolut dan universal harus diterjemahkan ke dalam kehidupan yang kontekstual. Ketika berhadapan dengan arus perubahan sosial yang berada dihadapannya mampukah nilai-nilai spiritualitas menjadi acuan bagi perubahan?. Jawabannya bisa "ya" dan bisa "tidak", Tergantung bagaimana cara memaknai nilai spiritual (tauhid). Jika tauhid dimaknai sebatas hubungan individual hamba dengan Tuhannya semata, maka dapat disimpulkan bahwa tauhid akan mengalami stagnansi di tengah perubahan yang terjadi. Seyogyanya setiap muslim harus mampu menjadi actor dari perubahan sosial yang terus terjadi

Kata Kunci: *spiritualitas, tauhid, perubahan sosial*

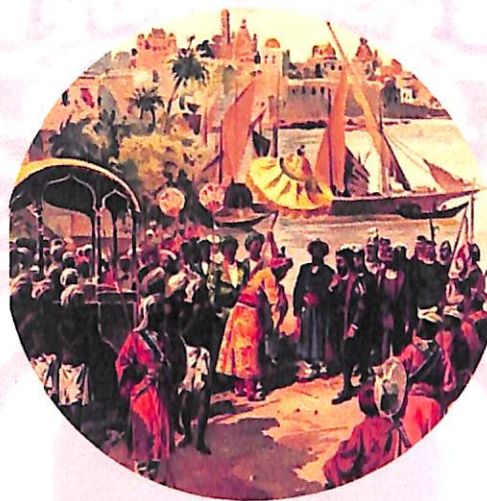
A. Pendahuluan

Spiritualitas dapat dipandang sebagai bentuk kehidupan beragama dalam mengimplementasikan pemahaman terhadap ajaran tauhid yang terbentuk pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. kehidupan spiritual diyakini mampu membawa dan mengendalikan pola kehidupan seseorang kepada arah yang baik.

Dengan demikian sikap dan perilaku dapat dikendalikan dengan adanya nilai spiritual dalam diri seseorang. Ibadah-ibadah yang dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari nilai spiritual (tauhid) dalam kehidupan religious seperti shalat dapat mengambat dan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah;

Al-Adyan

JURNAL ILMU PERBANDINGAN AGAMA



Sirajuddin Zar

**Kerukunan Hidup Beragama Ditinjau dari Perspektif Agama-Agama
Sulthan Ahmad**

***Taboo Incest: Tinjauan Historis-Antropologis tentang Tabu Hubungan Sedarah
Wakidul Kohar***

**Pengembangan Media Komunitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam
Indra**

**Spiritualitas dan Perubahan Sosial
Faisal Zaini Dahlan**

**Resistensi Etnis Minangkabau terhadap Isu Kristenisasi di Media Sosial
Sefriyono**

**Wawasan Jihad dalam Al-Qur'an
Yelmi Eri Fardius**

**Agama Menghadapi Tantangan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Andri Ashadi**

Hadis-hadis Larangan *Tashabbuh* terhadap Umat Yahudi dan Nasrani

Al-Adyan

JURNAL ILMU PERBANDINGAN AGAMA



Sirajuddin Zar

Kerukunan Hidup Beragama Ditinjau dari Perspektif Agama-Agama

Sulthan Ahmad

Taboo Incest: Tinjauan Historis-Antropologis tentang Tabu Hubungan Sedarah

Wakidul Kohar

Pengembangan Media Komunitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam

Indra

Spiritualitas dan Perubahan Sosial

Faisal Zaini Dahlan

Resistensi Etnis Minangkabau terhadap Isu Kristenisasi di Media Sosial

Sefriyono

Wawasan Jihad dalam Al-Qur'an

Yelmi Eri Fardius

Agama Menghadapi Tantangan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Andri Ashadi

Hadis-hadis Larangan *Tashabbuh* terhadap Umat Yahudi dan Nasrani